

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN HUTAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Rihman Maha^{1*}, Raja Masbar²

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email: maharihman@gmail.com
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email: raja.masbar@unsyiah.ac.id

Abstract

This research studies the effects of transfer function of forest areas on the economy of Indonesia's four big islands, namely Sumatera, Jawa, Kalimantan and Sulawesi. The secondary data used in this research were the data regarding the changes of Forest's Vastness (FV), permanent Production Forest (PF), Limited Production Forest (LPF) and Convertible Forest (CF), the effects were then analyzed based on the growth of economy on the four big islands from 2001 to 2015. This research used data panel regression model. This research found that the changes in FV effected negatively and significantly on the growth of economy on Sumatera and Sulawesi islands. Unlike Kalimantan and Jawa islands the changes in FV effected positively and significantly on the growth of economy. The research also found that the effects of the vastness of production forests consisting of PF, CF, and LPF on the four islands were also each has different effects. Furthermore, it is suggested that the government make effective policies regarding organizing Indonesia's forest areas so that the transfer function of forests can impact positively on the economy and the prosperity of the nation.

Keywords: *Economic Growth, Forest's Vastness (FV), Permanent Production Forest (PF), Limited Production Forest (LPF), and Convertible Forest (CF).*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari alih fungsi lahan kawasan hutan terhadap perekonomian di empat pulau besar Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Data sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data mengenai perubahan Luas Hutan (LH), hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di empat Pulau tersebut dari tahun 2001-2015. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa perubahan LH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Berbeda dengan Pulau Jawa dan Kalimantan, justru perubahan LH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di dua pulau ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh dari luas hutan produksi yang terdiri dari HP, HPK, dan HPT di empat pulau ini masing-masing mempunyai pengaruh yang berbeda. Dengan demikian, disarankan kepadapemerintah agar mampu membuat kebijakan yang efektif terkait pengelolaan kawasan hutan Indonesia, agar dampak dari alih fungsi hutan benar-benar bisa memberikan dampak yang baik bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Luas Hutan (LH), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

PENDAHULUAN

Hutan yang berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 4 mengenai penguasaan Hutan. Kawasan hutan dikuasai oleh negara karena fungsi hutan yang penting sebagai penyangga ekosistem lingkungan dan hutan sekaligus juga bisa sebagai modal (lahan) yang penting sebagai penyangga perekonomian, karena didalam kawasan hutan terdapat bahan baku yang penting untuk proses produksi. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 ini juga sekaligus menjadi sebuah legitimasi yang membolehkan kawasan hutan untuk diubah fungsinya menjadi kawasan untuk sektor industri. Perubahan fungsi kawasan hutan ini diatur dalam pasal 19 dan pada Pasal 38 juga mengatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Kebijakan yang didasarkan atas undang-undang ini, juga diharapkan agar berpengaruh penting serta bernilai strategis bagi perekonomian suatu wilayah. Sehingga diharapkan perubahan fungsi kawasan hutan tidak hanya berpengaruh terhadap luas kawasan hutan Indonesia secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Data terakhir menunjukkan bahwa luas areal hutan Indonesia adalah 96,4 juta hektar atau 51,53 persen dari luas daratan Indonesia, sedangkan areal yang tidak berhutan seluas 91,4 juta hektar atau 48,7 persen. Selisih perbedaan antara luas areal berhutan dan areal tidak berhutan di daratan Indonesia hanya 4 persen saja (Statistik KLHK, 2015). Kawasan areal tidak berhutan dalam hal ini termasuk didalamnya kawasan pemukiman, kawasan industri, dan areal untuk infrastruktur publik. Luas daratan tersebut terdiri atas luas areal berhutan seluas 96.490,8 juta hektar (51,53 persen) dan Areal tidak berhutan seluas 91.427,5 juta hektar (48,7 persen). Areal berhutan ini diklasifikasikan lagi menjadi Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman. Data luas areal berhutan dan areal tidak berhutan terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun akibat adanya konversi lahan untuk memenuhi kebutuhan lahan di berbagai sektor perekonomian. Perlu diketahui bahwa luas areal berhutan berbeda dengan luas kawasan hutan yang disepakati pemerintah. Areal berhutan adalah hutan alami dengan pohon-pohon lebat yang menutupi daratan atau biasa disebut dengan tutupan hutan. Kawasan hutan yaitu kawasan hutan yang dikuasai oleh negara baik dalam areal berhutan maupun areal tidak berhutan. Data terakhir menyebutkan bahwa total luas kawasan hutan seluas 126 juta hektar lebih (KLHK, 2015).

Perekonomian setiap negara salahsatunya ditopang oleh sumberdaya alam yang tersedia di wilayah negara tersebut. Tanah merupakan salah satu sumberdaya dan modal yang penting. Tanah merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumberdaya tanah merupakan masukan (input) yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia [CITATION MSu97 \l 1033]. Tanah yang merupakan variabel input menyebabkan tanah menjadi bernilai secara ekonomi. Nilai tanah tidak hanya dalam bentuk harga tetapi tanah juga merupakan nilai dalam bentuk modal dan aset yang penting, dan nilainya terus meningkat dari waktu ke waktu..

Sumberdaya tanah yang merupakan masukan yang penting untuk kegiatan-kegiatan produktif dan bernilai ekonomi seringkali harus mengorbankan kawasan hutan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan dan berkurangnya luas hutan Indonesia, yaitu: pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata, dan konversi hutan untuk pengembangan perkebunan dan pertambangan [CITATION UND97 \l 1033]. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan di tambah lagi dengan penyebarannya yang tidak merata, menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Lahan yang sifatnya terbatas terpaksa mengorbankan kawasan hutan

demikian untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas akan perumahan. Lahan yang terbatas terutama di kawasan perkotaan, menyebabkan dibukanya lahan-lahan baru yang terpaksa harus mencaplok kawasan-kawasan yang dahulunya adalah kawasan hutan untuk kemudian di konversi (dialih fungsikan) menjadi kawasan pemukiman.

Konversi atau alih fungsi kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan juga terjadi untuk kebutuhan di sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Sektor perkebunan menjadi penyebab utama maraknya konversi lahan kawasan hutan [CITATION Bas99 \l 1033]. Proses konversi lahan juga menimbulkan masalah baru, yaitu deforestasi atau perubahan kondisi tutupan lahan dari hutan menjadibukan hutan yang dilakukan dengan cara membakar lahan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian dan pencemaran udara (Purnomo, dkk 2017).

Alih fungsi lahan selain disebabkan oleh kepadatan penduduk dan faktor lokasi, alih fungsi lahan juga diperparah oleh pola pembangunan infrastruktur yang selama ini turut menyerobot lahan pertanian. Untuk membangun sarana infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, tentu memerlukan lahan dan tidak jarang lahan yang berada di dalam kawasan hutan menjadi korban demi untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur yang juga penting bagi perekonomian. Pengundulan hutan akibat Eksploitasi hutan yang selama ini dilakukan secara berlebihan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan konversi hutan telah mengakibatkan kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan, krisis kerusakan hutan juga terjadi di hutan konservasi dan hutan lindung. HPH yang diberikan oleh pemerintah seolah-olah menjadi semacam legitimasi bagi pihak-pihak tertentu untuk merusak hutan dengan dalih mengelola hutan. Berikut merupakan data perbandingan mengenai kondisi hutan Indonesia tahun 1950, tahun 1985, dan kondisi hutan Indonesia tahun 2013.

Tabel 1. Kondisi Hutan di Indonesia 1950, 1985, 2013 (Ribu Hektar)

Pulau	Luas Daratan		Tutupan Hutan	Tutupan Hutan	Tutupan Hutan
	Luas (rb Ha)	%	Luas (rb Ha)	Luas (rb Ha)	Luas (rb Ha)
Sumatera	46.616	25%	37.370	23.323	11.344
Jawa	12.743	7%	5.070	1.274	675
Bali & Nusa	7.137	4%	3.400	1.156	1.188
Kalimantan	53.099	28%	51.400	39.644	26.604
Sulawesi	18.297	10%	17.050	11.192	8.928
Maluku	7.652	4%	7.300	5.790	4.335
Papua	41.000	22%	40.700	35.192	29.413
Luas Total	186.544		162.290	117.571	81.299

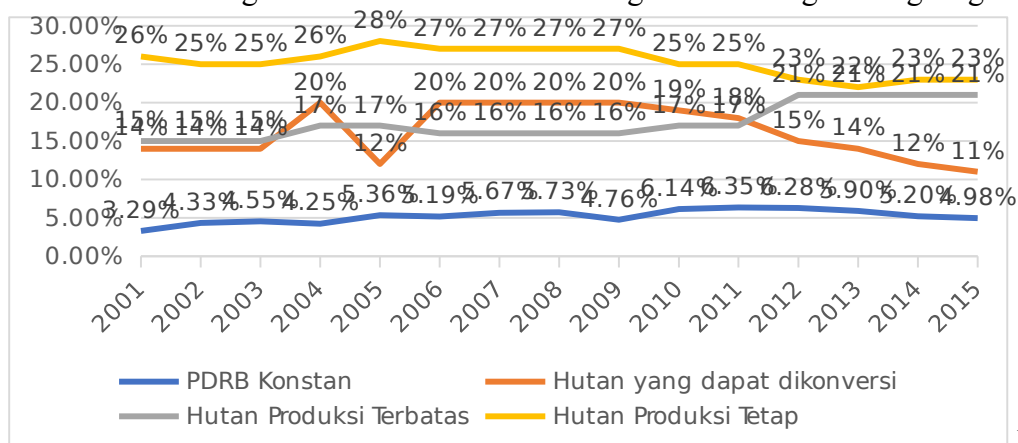
Sumber: *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup 2015 [CITATION KLH16 \l 1033]; diolah*

Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013 [CITATION For14 \l 1033]; diolah

Kondisi hutan Indonesia pada tabel 1.1 menunjukkan sesuatu yang menarik, khususnya yang terjadi dengan kondisi tutupan hutan di pulau jawa dan pulau papua. Kondisi tutupan hutan setelah lima tahun Indonesia Merdeka (tahun 1950), di dua wilayah ini menunjukkan hal yang kontras. Kondisi tutupan hutan di Pulau Papua pada tahun 1950-an dari total luas daratan di Papua, 99 persennya adalah masih merupakan tutupan hutan yang rimbun dengan pepohonannya.

Dan pada tahun yang sama (1950) luas tutupan hutan di daratan Pulau Jawa hanya 40 persen atau dalam artian sudah berkurang 60 persen dari total luas daratan Pulau Jawa. Data ini menunjukkan bahwa laju konversi lahan sangat cepat terjadi di Pulau Jawa dibandingkan dengan laju konversi lahan di pulau-pulau lain di Indonesia terutama di Pulau Papua. Kondisi tutupan hutan pada tahun 1985 atau 35 tahun kemudian, tutupan hutan di Papua berkurang menjadi 86 persen, sedangkan tutupan hutan di Pulau Jawa hanya tersisa 10 persen dari total luas daratannya.

Undang-undang revisi terbaru nomor 31 tahun 2014 tentang tata cara pemberian dan perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) mengatur bahwa kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara dan bisa digunakan oleh pihak swasta dengan memberikan konsesi atau perizinan kepada pihak swasta untuk mengelola dan mengembangkan hasil hutan yang termasuk dalam kawasan hutan produksi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai tata cara untuk menguasai dan mengelola kawasan hutan oleh pihak swasta (perorangan maupun perusahaan) melalui Hak Guna Usaha (HGU). HGU merupakan bentuk izin yang dilegitimasi oleh pemerintah agar pihak-pihak swasta mempunyai hak untuk mengeksploitasi hasil hutan negara. Sektor perkebunan, pertambangan, dan industri lainnya yang menyerobot kawasan hutan Negara memerlukan izin berupa HGU. HGU merupakan hak Eksploitasi kawasan hutan produksi untuk kemudian bisa mengelola secara sah dan dilindungi oleh undang-undang Negara.



Kawasan

hutan negara terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Hutan produksi terbagi lagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). HGU yang diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang tatacara IUPHHK menegaskan bahwa izin tersebut harus berada dalam kawasan Hutan Produksi. HGU yang diterbitkan oleh pemerintah tentu berpengaruh pada luas kawasan hutan terutama kawasan hutan produksi. Berikut adalah laju luas HP, HPK, dan HPT yang dibandingkan dengan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan Indonesia tahun 2001 sampai dengan tahun 2015.

Sumber: Badan Pusat Statistik berbagai terbitan (diolah),
 Statistik KLHK berbagai Terbitan (Diolah).

Gambar 1. Perbandingan Luas Kawasan Hutan Produksi dan PDRB menurut Harga Konstan tahun 2000 Indonesia tahun 2001-2015

Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa HP adalah kawasan terluas dari pada HPT dan HPK. Luas HP tahun 2001 sampai tahun 2009 berkisar diangka 25 sampai 27 persen pada tahun 2009 dengan luas 36 juta hektar lebih. Angka ini terus menurun menjadi 23 persen pada tahun 2015 dengan luas HP seluas 29 juta hektar lebih. Persentase luas HPT dalam Grafik 1.2

menunjukkan angka yang terus meningkat. Persentase luas HPT pada tahun 2001 sebesar 15 persen dengan luas 16 juta hektar lebih dan terus meningkat dengan persentase terakhir pada tahun 2015 dengan angka 21 persen dengan luas lahan hutan sebesar 26 juta hektar.

Gambar 1.2 tersebut juga menunjukkan bahwa hutan yang dapat dikonversi dalam kurun waktu 15 tahun (2001-2015), angkanya terus berubah dan cenderung menurun semenjak tahun 2009 sampai tahun 2015. Angka laju hutan yang dapat dikonversi pada tahun 2001 menunjukkan angka sebesar 14 persen dengan hutan yang dapat dikonversi seluas 13,6 juta hektar lebih. Meningkat drastis pada tahun 2004 menjadi 20 persen dengan luas hutan yang dapat dikonversi menjadi 22 juta hektar lebih. Tahun berikutnya, sempat menurun menjadi 12 persen atau sekitar 14 juta hektar untuk dikonversi. Luas hutan yang bisa dikonversi pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 20 persen dan angkanya cenderung tetap sampai tahun 2008 dengan luas berkisar di angka 22 juta hektar. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, luas hutan yang dapat dikonversi angkanya terus menurun, dari 19 persen pada tahun 2009 menjadi 11 persen pada tahun 2015. Angka 11 persen pada tahun 2015 bukanlah angka yang sedikit, 11 persen luas hutan yang dapat dikonversi adalah sebesar 12 juta hektar dari luas total keseluruhan hutan Indonesia sebesar 125 juta hektar lebih.

Data yang digambarkan dalam gambar 1.2 tersebut juga menjelaskan bahwa indikator perekonomian dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi (diukur dari peningkatan PDRB konstan), angkanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Persentase angka PDRB pada tahun 2001 sampai tahun 2003 meningkat dari 3,29 persen pada tahun 2001 menjadi 4,55 persen tahun 2003. Angka ini sempat menurun menjadi 4,25 persen pada tahun 2004, namun angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan sampai menyentuh angka 5,7 persen pada tahun 2008. Tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 4,76 persen, dan ditahun berikutnya pertumbuhan ekonomi konstan Indonesia terus meningkat dan mencapai peningkatan tertinggi sebesar 6,35 persen pada tahun 2011.

Alih fungsi lahan salahsatunya dipengaruhi adanya kebijakan dari pemerintah. Salah satu kebijakan yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan fungsi hutan adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang revisi terbaru nomor 31 tahun 2014 tentang tata cara pemberian dan perluasan IUPHHK. Undang-undang Nomor 41 mengenai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 19 dan tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang diatur dalam Pasal 38. Produk hukum yang menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya tentu akan berpengaruh pada sektor perekonomian. Pengaruh inilah yang berusaha untuk saya kaji dalam penelitian ini. Selain berpengaruh pada perekonomian Indonesia, kebijakan yang dilegitimasi oleh Undang-undang Nomor: 41 tahun 1999 ini, tentu akan berpengaruh juga terhadap luas kawasan hutan. Kebijakan alih fungsi kawasan hutan yang ditopang oleh kekuatan hukum menjadikan hutan sebagai subjek yang harus dikorbankan demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan kondisi yang sudah berlangsung lama ini, tentu menarik untuk mengetahui seberapa luas sudah kawasan hutan yang dikorbankan, dan seberapa besar peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam PDRB menurut harga konstan tahun 2000.

Perekonomian Indonesia dalam penelitian ini diukur dari capaian pertumbuhan ekonomi di empat pulau Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi di empat pulau ini, selanjutnya diukur berdasarkan data total PDRB konstan dengan tahun dasar 2000 menurut provinsi-provinsi di empat pulau tersebut. Empat pulau tersebut merupakan sampel dari penelitian ini. Empat pulau ini dipilih dikarenakan dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2015 kondisi kawasan hutan di empat pulau ini mengalami perubahan yang fluktuatif (*Forest Watch Indonesia*, 2014). Perubahan luas kawasan hutan di Pulau Sumatera dan

Kalimantan salahsatunya ditenggarai oleh pembukaan lahan hutan untuk kawasan perkebunan kelapa sawit dan karet (*Forest Watch Indonesia*, 2014). Penelitian ini tidak memasukkan Pulau Bali Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikarenakan adanya masalah saat pengolahan data dan masalah ketersediaan data. Pulau Maluku dan Papua tidak ikut dianalisis dikarenakan luas kawasan hutan di dua pulau ini tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2001 sampai tahun 2015. Lain halnya dengan Pulau Bali Nusa Tenggara, data mengenai luas kawasan hutan dipulau ini tidak lengkap sehingga ketiga pulau ini (Pulau Bali Nusa, Maluku, dan Papua) tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Berdasarkan permasalahan ini, praktis penelitian ini hanya menganalisis pengaruh alih fungsi kawasan hutan terhadap perekonomian berdasarkan empat pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berdasarkan data dalam tabel 1.1, gambar 1.1., dan juga gambar 1.2 yang telah dipaparkan, menjadikan saya tertarik untuk menelusuri lebih jauh mengenai alih fungsi kawasan hutan yang diukur dari perubahan luas HP, HPT, dan Luas HPK. Alih fungsi lahan hutan dalam bentuk izin HGU dan HPH yang dilegitimasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, tentu berpengaruh pada luas hutan dan juga luas hutan produksi. Kondisi yang telah berlangsung lama ini, juga menarik untuk kemudian melihat dan menilai bagaimana pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia. Apakah alih fungsi hutan telah memberi pengaruh yang positif bagi perekonomian nasional? Jika memang berpengaruh bagi perekonomian, lalu seberapa besar kontribusinya bagi indikator perekonomian Indonesia? khususnya pertumbuhan ekonomi di empat pulau besar Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

TINJAUAN PUSTAKA

Alih fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya yang semula atau biasa disebut dengan konversi lahan [CITATION Wit96 \l 1033]. Konversi lahan menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Lahan yang sebelumnya untuk pertanian, karena adanya konversi lahan berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri. Konversi lahan yang terjadi tentu memiliki pengaruh lain. Menurut Nuryartono, dkk (2017) konversi lahan pertanian akan berpengaruh pada produksi pangan. ketersediaan lahan untuk pertanian sangat penting untuk menopang produksi pangan lokal dan nasional, jika lahan untuk kegiatan pertanian semakin berkurang tentu skala produksi pangan juga akan berkurang.

Penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh ekonomi yang ditimbulkan oleh konversi lahan dan hutan, salahsatunya dilakukan oleh Wu dkk (2008) yang menyimpulkan bahwa perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya untuk pertanian, lalu dikonversi untuk pembangunan kawasan perkotaan telah menurunkan produksi pangan dan kayu. Pengaruh alih fungsi lahan hutan yang secara khusus memberikan kewenangan pada pihak-pihak tertentu untuk mengelola kawasan hutan melalui izin HPH telah menyebabkan kerusakan hutan Indonesia seluas 16, 57 juta hektar dari tahun 1967 sampai 1998 (Kartodihardjo dan Supriono, 2000).

Kawasan hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi (KLHK, 2015). Kawasan hutan perluditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batasan dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadikawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional,

nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di masing-masing provinsi di Indonesia.

Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk mengelola dan memproduksi hasil hutan (KLHK, 2015). Hutan produksi memiliki fungsi pokok untuk menghasilkan hasil hutan, baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Hutan Produksi terbagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu HP, HPT, dan HPK. Kawasan HP merupakan hutan yang dapat dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. Hutan produksi dapat dikelola untuk kawasan sektor perkebunan dan pertambangan. HP biasanya berupa kawasan hutan yang memiliki kelerengan yang landai, datar, dan biasanya berada di kawasan hutan dengan tingkat erosi yang rendah. HPT merupakan kawasan hutan produksi dengan intensitas eksploitasi yang kecil atau terbatas karena umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang curam. Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan HPT dilakukan dengan cara tebang pilih. Terakhir adalah kawasan HPK adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan dalam pembangunan diluar kehutanan. Kawasan hutan ini biasanya dicadangkan untuk kemudian menjadi kawasan permukiman, transmigrasi, perkebunan, dan pertanian.

Perekonomian Indonesia

Perekonomian suatu negara salah satunya diukur dengan kemampuan negara tersebut untuk memproduksi barang atau jasa yang dinyatakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Mankiw (2000) dalam Ulfia (2013) menyatakan bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara adalah dengan melihat tingkat PDB yang mengukur total pendapatan suatu negara. PDB dalam skala daerah atau provinsi disebut pula sebagai PDRB yaitu jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam skala wilayah tertentu dalam satu periode atau dalam hal ini satu tahun.

Penelitian oleh Herkenhoff *et all* (2017) mengkaji mengenai pengaruh pembatasan penggunaan lahan oleh negara pada kegiatan ekonomi AS. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pembatasan lahan ini telah menekan aktivitas ekonomi makro sejak tahun 2000. Penelitian ini menggunakan dataset panel tentang luas batasan penggunaan lahan antara tahun 1950 sampai tahun 2014.

Penelitian oleh Damania, dkk (2017) mengkaji mengenai pembangunan jalan baru yang mengorbankan hutan dan keanekaragaman hayati di Republik Demokratik Kongo (DRC). Sebagian besar jalan provinsi di Kongo tidak terhubung langsung ke ibu kota negara. Dan disisi lain memperbaiki konektivitas jalan dapat membawa manfaat ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan yang telah dilakukan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan perdagangan dan ekonomi di Kongo sedangkan luas hutan alami terus berkurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara pembangunan jalan dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan, tetapi berpengaruh negatif terhadap luas hutan yang juga berkurang akibat pembangunan tersebut.

METODE PENELITIAN

Wilayah kajian yang di analisis dalam penelitian ini hanya di empat pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembatasan ini dilakukan karena permasalahan data. Data untuk Pulau Bali Nusa Tenggara terkendala karena data kawasan hutan di pulau ini tidak lengkap. Berbeda dengan data kawasan hutan di Pulau Papua dan Maluku,

permasalahannya adalah data kawasan hutan di Papua dan Maluku tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2015 atau dalam artian data kawasan hutannya tetap.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data jenis panel. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; data luas HP, HPT, HPK, dan data LH Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2015. Untuk melihat pengaruh yang telah dirasakan bagi perekonomian Indonesia, maka diperlukan juga data pembandingan, yaitu data PDRB menurut harga konstan tahun dasar 2000 perprovinsi di Indonesia dari tahun 2001 sampai 2015. Data PDRB menurut harga konstan yang digunakan adalah data dengan tahun dasar 2000. Data PDRB menurut provinsi yang dipakai adalah data PDRB provinsi-provinsi di tiga pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Data PDRB perprovinsi ini kemudian ditotal secara keseluruhan berdasarkan empat pulau besar tersebut. Jenis-jenis data yang dibutuhkan tersebut bersumber dari berbagai publikasi resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Model regresi data panel pada penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh dari perubahan luas kawasan hutan (LH) dan pengaruh dari perubahan luas kawasan hutan produksi (HP, HPK, dan HPT) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di empat pulau besar di Indonesia. Berikut adalah bentuk model yang digunakan.

$$\text{LogPDRBit} = \alpha + \text{Log}\beta_1\text{HPit} + \text{Log}\beta_2\text{HPKit} + \text{Log}\beta_3\text{HPTit} + \text{Log}\beta_4\text{LHit} + \epsilon_{it}.$$

Sumber: Gujarati & Porter, 2012

Keterangan:

LogPDRBit	:	Indikator pertumbuhan ekonomi atau Nilai dari dependen variabel di wilayah tertentu pada waktu t
α	:	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$:	koefisien regresi
i	:	Kawasan atau wilayah yang diteliti (Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)
t	:	Periode waktu yang diteliti 2001-2015
LogHPKit	:	Luas Hutan yang dapat Dikonversi di wilayah tertentu pada waktu t
LogHPit	:	Luas Hutan Produksi Tetap di wilayah tertentu pada waktu t
LogHPTit	:	Luas Hutan Produksi Terbatas di wilayah tertentu pada waktu t
LogLHit	:	Luas Hutan di wilayah tertentu pada waktu t

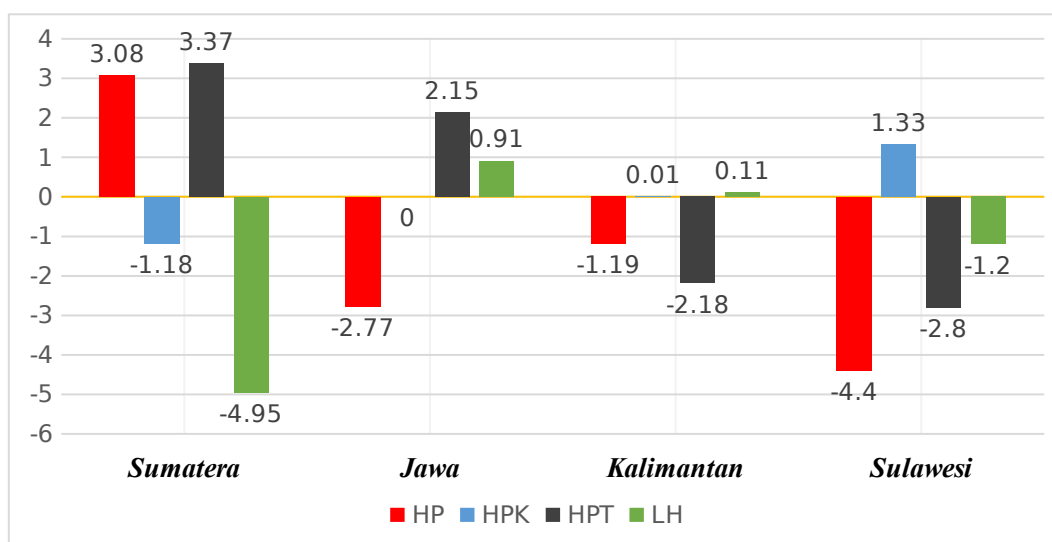
Model persamaan 3.2 tersebut adalah bentuk model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Bentuk model persamaan 3.2 tersebut digunakan untuk meregres data pada masing-masing empat pulau yang kaji. Model persamaan tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari alih fungsi lahan kawasan hutan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

HASIL PEMBAHASAN

Pengujian model yang telah dilakukan untuk masing-masing persamaan model regresi, menghasilkan suatu gambaran mengenai pengaruh variabel independen (HP, HPK, HPT, dan LH) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi/PDRB). Alih fungsi lahan yang diukur dari perubahan luas HP, HPK, HPT, dan LH pertahun, selanjutnya diperbandingkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hasil pengujian ini, selanjutnya akan dipaparkan dalam bentuk grafik agar lebih mudah untuk

diketahui bagaimana persamaan dan perbedaan dari hasil uji yang telah dilakukan. berikut adalah tabel mengenai hasil regresi yang telah dilakukan.

Tabel 2. Gambaran Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen dalam Penelitian untuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi



Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9 (2018)

Tabel 4.29 adalah gambaran hasil dari pengaruh variabel independen (HP, HPK, HPT, dan LH) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi/PDRB) di empat Pulau yang di analisis. Tabel 4.29 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen mempunyai perbedaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera dan Sulawesi variabel LH sama-sama berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan LH di Pulau Kalimantan dan Jawa, justru LH berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua pulau ini.

Variabel hutan produksi (HP, HPK, dan HPT) juga mempunyai pengaruh yang berbeda-beda untuk masing-masing Pulau. Tabel 4.29 menunjukkan bahwa HP dan HPT di Pulau Sumatera berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera. Berbeda dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, HP dan HPT justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi. Menariknya hutan produksi jenis HPT justru berpengaruh positif dan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Perbedaan pengaruh HP dan HPT terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi diduga adalah adanya kawasan hutan produksi yang terlantar atau tidak dikelola dengan baik. Dugaan ini berdasarkan laporan menteri KLHK pada tahun 2013, yang menyebutkan bahwa 48 juta hektar hutan produksi Indonesia dalam keadaan terlantar (Republika, 2013). Luas hutan produksi yang terlantar tersebut terdiri dari 33,6 juta hektar hutan HPH yang tidak aktif dan 12,5 juta hektar merupakan hutan yang berada dalam status moratorium (proses pembatalan izin), sedangkan sisanya merupakan hutan alam produksi.

Menurut menteri KLHK dalam laporan berita Tempo (2013), menyatakan bahwa luas kawasan hutan produksi yang terlantar semakin bertambah menyusul banyaknya izin HPH yang tidak aktif atau tidak dapat beroperasi, meski izin masih berlaku. Tahun 2013, pemilik izin HPH ada sebanyak 294 unit. Izin HPH yang beroperasi dan aktif hanya sebanyak 115 unit atau 39 persen. Sisanya 179 unit (61 persen) izin HPH tidak beroperasi. Masalah hutan produksi yang

terlantar dan izin HPH yang tidak aktif dalam mengelola hutan produksi diduga menjadi penyebab mengapa ada hutan produksi yang justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi data panel yang dilakukan, berikut adalah hasil penelitian di empat pulau tersebut:

1. Hasil regresi untuk wilayah Pulau Sumatera menunjukkan bahwa perubahan LH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Untuk variabel hutan produksi, hanya HPK yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera, sedangkan HP dan HPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera dan ini sesuai dengan hipotesis awal.
2. Hasil regresi untuk wilayah Pulau Jawa menunjukkan bahwa perubahan LH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Untuk variabel hutan produksi, hanya HPT yang sesuai dengan hipotesis penelitian, dalam artian HPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, sedangkan HP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.
3. Hasil regresi untuk wilayah Pulau Kalimantan menunjukkan bahwa perubahan LH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Untuk variabel hutan produksi, hanya HPK yang sesuai dengan hipotesis penelitian, dalam artian HPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, sedangkan HP dan HPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan.
4. Hasil regresi untuk wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa perubahan LH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Untuk variabel hutan produksi, hanya HPK yang sesuai dengan hipotesis penelitian, dalam artian HPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi, sedangkan HP dan HPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat kebijakan yang efektif terkait dengan pengelolaan kawasan hutan Indonesia. kebijakan ini harus menekankan pada pengaruh-pengaruh real secara ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.. dengan kebijakan ini juga diharapkan, kawasan hutan yang telah dialihfungsikan agar benar-benar dikelola dengan profesional sehingga kawasan hutan yang dikorbankan benar-benar memberi pengaruh yang lebih baik bagi perekonomian.
2. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada hutan produksi yang terlantar dan juga mengharuskan kepada pemilik izin HPH atau HGU untuk bisa aktif dalam mengelola kawasan hutan produksi, sehingga izin HPH atau HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian.

3. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya kawasan hutan produksi yang berpengaruh negatif bagi perekonomian, sebaiknya ditetapkan sebagai hutan lindung atau hutan suaka alam, agar keberadaan hutan semakin terjaga.
4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain, seperti luas izin konsesi hutan (HPH atau HGU) untuk dianalisis pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap SK Pelepasan Hutan) s.d. Tahun 2015*. Diakses 01 Januari 2017, dari: www.bps.go.id.
- _____. (2015). Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2000-2013 (milyar rupiah). Diakses 01 Januari 2017, dari: <https://www.bps.go.id>.
- _____. (2017). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2017. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2016). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2016. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2015). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2015. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2014). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2014. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2013). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2013. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2012). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2012. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2011). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2011. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2010). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2010. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2009). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2009. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2008). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2008. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2007). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2007. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2006). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2005/2006. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2005). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2004. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2004). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2003. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- _____. (2002). Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2002. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Kehutanan*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)*.

- Pusat Data dan Informasi KLHK. (2015). *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Suparmoko, M. (1997). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. BPFE. Yogyakarta
- Republika. (2013). *48 Juta Hektar Hutan Produksi di Indonesia Terlantar*. 04 September. Diakses 03 Mei 2018, dari: m.republika.co.id.
- Tempo. (2013). *33,6 Juta Hektare Hutan Produksi Terlantar*. 04 September. Diakses 03 Mei 2018, dari: <https://bisnis.tempo.co/>.
- Damania, Richard., Jason Russ., David Wheeler., and Alvaro Federico Barra. (2018). The Road to Growth: Measuring the Tradeoffs between Economic Growth and Ecological Destruction. *World Development*. Vol. 101, 351-376.
- Forest Watch Indonesia . (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Gujarati, Damodar, N. & Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Selemba Empat.
- Herkenhoff, Kyle. Ohanian, Lee. Prescott, Edward. (2017). Tarnishing the golden and empire states: Land-use restrictions and the U.S. economic slowdown. *Journal of Monetary Economics*, 1-21.
- Kartodihardjo., dan Agus Supriono. (2000). *Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*. CIFOR: Occasional Paper No. 26 (I), 1-14.
- Nuryartono, N., A. Tongato., S. Yusdiyanto., S.H. Pasaribu., dan T. Anggraenie. (2017). Land conversion and economic development in Jawa Barat Province: Trade off or Synergy?. Conf. Series. *Earth and Environmental Science*. Vol. 54: 1-10.
- Purnomo, Herry. Bayuni Shantiko, Soadun Sitorus. Harris Gunawan. Ramadhani Achdiawan, Hariadi Kartodihardjo. and Ade Ayu Dewayani. (2017). Fire Economy and Actor Network of Forest and Land Fires in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, Vol. 78: 21-31.
- Ulfa, Said Muhammad, Raja Masbar. (2013). Pengaruh Tingkat Bunga Amerika Serikat, Tingkat Bunga Indonesia, Nilai Tukar dan Ekspor terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No.3: 90-99.
- UNDP, KMNLIH. (1997). *Agenda 21 Indonesia*. Jakarta: United Nations Development Program, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Witjaksono, R. (1996). *Alih Fungsi Lahan: Suatu Tinjauan Sosiologis. Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air* (pp. 113-120). Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation.
- Wu, JunJie. (2008). *Land Use Changes: Economic, Social, and Environmental Impacts*. Choices Agricultural & Applied Economics Association, Vol. 23 (4): 6-10.